

## **ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN OBJEK PAJAK (SISMIOP) DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAEAH KABUPATEN BANDUNG**

Oleh

**Muhammad Ridwan Caesar<sup>1)</sup>, Asep Rahmat Andi<sup>2)</sup>**

<sup>1),2)</sup>Dosen Administrasi Negara FISIP Universitas Al-Ghifari Bandung

Email: <sup>1)</sup>Caesar.fosop13@gmail.com, <sup>2)</sup>asramwaran@gmail.com

**ABSTRAK.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem informasi manajemen (SISMIOP) Di Kantor pendapatan daerah kabupaten bandung. Hadirnya SISMIOP sebagai upaya transformasi digital dalam pelayanan publik khusus pada perpajakan yakni ditujukan untuk objek pajak salah satunya pada Di Kantor pendapatan daerah kabupaten bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari 4 teknik, yaitu; penelitian pustaka, penelitian lapangan, observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini informan berjumlah empat orang yang terdiri dari Kepala Dinas, Kasubag Data dan Informasi, Staf dan Pegawai dan Tim Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Hasil penelitian berdasarkan beberapa aspek penilaian efektivitas dengan adanya SISMIOP di Kabupaten bandung bisa di simpulkan sudah berjalan optimal, naun ada beberapa perbaharuan yang sifatnya perlu penyesuaian antara pemerintah daerah itu sendiri dengan pemerintah pusat.

**Kata kunci : efektivitas, Pajak, SISMIOP**

**ABSTRACT.** *This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of a management information system (SISMIOP) in the regional revenue office of Bandung regency. The presence of SISMIOP as a digital transformation effort in public services specifically on taxation is intended for tax objects, one of which is at the Bandung Regency Regional Revenue Office. The method used in this research is a qualitative method. The data collection techniques carried out consisted of 4 techniques, namely; library research, field research, observation and interviews. In this study, there were four informants consisting of the Head of Service, Head of the Data and Information Subdivision, Staff and Employees and the Implementation Team of the Bandung Regency Regional Revenue Agency. The results of the study based on several aspects of effectiveness assessment with the existence of SISMIOP in Bandung Regency can be concluded that it has been running optimally, but there are some updates that need adjustment between the local government itself and the central government.*

**Keywords: effectiveness, tax, SISMIOP**

## **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia termasuk dalam Negara Berkembang. Indonesia saat ini banyak melakukan pembangunan di segala bidang seperti bidang hukum, politik, pendidikan, ekonomi serta bidang-bidang lainnya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di setiap negara memerlukan biaya yang besar, oleh karena itu sumber biaya yang bisa diharapkan mengalami peningkatan salah satunya dapat berasal dari pajak.

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pajak dikategorikan pengelolaannya menjadi pajak yang dapat dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sebelum tahun 2014 pajak bumi dan bangunan termasuk dalam jenis pajak pusat, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan telah diserahkan kepada kota/kabupaten. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang objeknya bumi dan bangunan dan wajib pajaknya orang atau badan yang memiliki, menguasai dan atau mengambil manfaat atas bumi dan bangunan. Berdasarkan hal tersebut jumlah

objek dan wajib pajak PBB sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah.

Wewenang penagihan telah diserahkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini aparat desa/kelurahan untuk melaksanakan penagihan PBB. Namun setiap daerah memiliki karakter berbeda-beda, sehingga dengan adanya perbedaan kemampuan ini sering terjadi banyak kendala seperti keterlambatan dalam hal pemberian pelayanan yang merugikan wajib pajak dan pemerintah atau terjadinya pengendapan pajak. Banyaknya terjadi ketidakakuratan data seperti pada kesalahan nama wajib pajak maupun luas dan letak objek pajak, banyak pula wajib pajak yang merasa nilai jual objek pajak (NJOP) tidak sesuai sehingga mereka menuntut pengurangan serta rendahnya kesadaran wajib pajak sehingga menyebabkan penagihan PBB tidak berjalan maksimal. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak melakukan kebijakan dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern PBB yaitu dengan menggunakan sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP).

SISMIOP merupakan jantung PBB karena seluruh aspek pengelolaan administrasinya yang dapat mengelola data objek pajak dan subjek pajak yang sudah terkomputerisasi mulai dari proses pendataan, penilaian, penagihan,

penerimaan dan pelayanan. Adanya SISMIOP dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan up to date dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB kedalam suatu wadah, sehingga pelaksanaannya lebih seragam, sederhana, cepat dan efisien.

Berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak telah dilaksanakan, akan tetapi masih banyak ditemukan wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Dengan diterapkan SISMIOP diharapkan maka akan meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik mulai dari pendataan sampai dengan pelayanan satu tempat dan penerimaan pajak bumi dan bangunan juga diharapkan akan meningkat.

Upaya untuk mencapai Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung yang baik tentu harus adanya pembagian tugas yang jelas pula terhadap program-program kerja yang akan dilaksanakan oleh pegawai atau karyawan. Suatu organisasi atau instansi yang sudah memiliki efektivitas kerja yang baik, berarti organisasi atau instansi tersebut dapat menjalankan fungsinya dalam mengimpun,

mengorganisir, dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan untuk organisasi serta kerjasama yang terarah, sehingga terciptanya efektivitas dan efisiensi kerja. Hal ini akan memudahkan organisasi atau instansi tersebut dalam mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi atau instansi yang bersangkutan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Efektivitas Organisasi**

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut pendapat Steers (dalam Irawati, 2013; 6-7), terdapat lima wujud yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi, diantaranya:

1. Kejelasan tujuan

Tujuan sangat penting dirumuskan dengan jelas karena akan digunakan sebagai tolak ukur pembentukan organisasi. Tujuan tersebut dapat melahirkan berbagai macam fungsi dan fungsi-fungsi tersebut dapat memperkuat organisasi dan memberikan fokus bagi kegiatan- kegiatan organisasi untuk mencapai hasil-hasil yang dikehendaki secara baik. Penetapan tujuan yang baik memiliki syarat sebagai berikut:

- Tujuan organisasi harus ditetapkan secara formal dan dirumuskan secara tertulis agar dapat diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota.
- Jarak pencapaian tujuan berupa tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ditetapkan secara jelas.
- Tujuan dirumuskan secara jelas dan lengkap agar mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- Tujuan organisasi tidak berbenturan dengan tujuan organisasi lainnya untuk menghindari terjadinya kebingungan yang dialami oleh anggota.

Filosofi dan sistem nilai Filosofi berhubungan dengan hal mengapa organisasi dibentuk, apa dasar pemikirannya, dan apa yang ingin dicapai. Dalam prakteknya, filosofi organisasi sering diwujudkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan tata nilai berkaitan dengan peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang

baku yang ditetapkan bersama untuk dijadikan pedoman beraktivitas dalam organisasi. Tata nilai mengatur aktivitas perorangan dalam organisasi yang dijabarkan ke dalam bentuk peraturan-peraturan, seperti peraturan disiplin dan peraturan jam kerja.

#### 1. Komposisi dan Struktur.

Komposisi menunjukkan adanya latar belakang (tingkat pendidikan, tingkat kemampuan intelektual, ciri-ciri kepribadian, dan motivasi) dari anggota organisasi atau kualifikasi yang diperhatikan sejalan dengan peranan, tugas, dan fungsi serta aktivitas pencapaian tujuan. Sedangkan struktur organisasi mengacu pada bagaimana organisasi mengatur dirinya, dengan membagi tugas dan peranan secara baik, penetapan uraian tugas secara lengkap serta jelas, dan adanya pengaturan kewenangan oleh unsur pimpinan secara jelas, sehingga mampu menggambarkan kebutuhan untuk pencapaian tujuan organisasi.

#### 2. Teknologi Organisas

Pemanfaatan teknologi modern yang diimbangi dengan kompetensi penggunaannya oleh karyawan akan menciptakan daya dukung bagi percepatan pencapaian tujuan organisasi.

#### 3. Lingkungan organisasi

Lingkungan disini merupakan kondisi lingkungan/suasana kerja di dalam organisasi yang berpengaruh terhadap

produktivitas kerja dan hubungan yang harmonis bagi karyawan khususnya yang berkaitan dengan lingkungan fisik, seperti tingkat kebisingan, tata letak ruang kerja, penataan warna, dan penataan ruang dalam maupun luar ruangan. Lingkungan organisasi yang memadai akan mempengaruhi keefektifitasan organisasi.

### **Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak**

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak adalah :“Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan computer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan Satu Tempat.

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak merupakan sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran.

SISMIOP terdiri dari 3 (tiga) unsur dan beberapa subsistem. Unsur- unsur tersebut yaitu :

a) Nomor Objek Pajak (NOP)

- Merupakan nomor unik yang menunjukkan identitas tiap-tiap objek pajak.
- Ciri-ciri yang melekat pada NOP adalah: Unik, Permanen dan Standar.
- Format penomoran NOP adalah sebagai berikut:
- NOP ditetapkan 18 digit.

Contoh format NOP:  
AABBCCDDDEEEXXXY

A = kode provinsi (sesuai standar dari BPS).

B = kode kabupaten/kota (sesuai standar dari BPS).

C = kode kecamatan (sesuai standar dari BPS).

D = kode desa/kelurahan (sesuai standar dari BPS).

E = kode blok.

X = nomor NOP.

Y = kode khusus/cek digit.

b) Blok

Blok ditetapkan menjadi suatu areal pengelompokan bidang tanah terkecil untuk digunakan sebagai petunjuk lokasi objek pajak yang unik dan permanen. Syarat utama sistem identifikasi objek pajak adalah stabilitas. Perubahan yang terjadi pada sistem identifikasi dapat menyulitkan pelaksanaan dan administrasi. Alasan kestabilan ini yang menyebabkan RT/RW/RK atau sejenisnya yang cenderung mengalami perubahan yang relatif tinggi tidak dimanfaatkan sebagai salah satu komponen untuk mengidentifikasi objek pajak yang bersifat permanen dalam jangka panjang. Sehingga apabila RT/RW/RK atau sejenisnya dimasukkan sebagai bagian dari NOP/blok dapat menyebabkan NOP/blok tidak permanen. Blok merupakan komponen utama untuk identifikasi objek pajak. Jadi penetapan definisi serta pemberian kode blok semantap mungkin sangat penting untuk menjaga agar identifikasi objek pajak tetap bersifat permanen.

Untuk menjaga kestabilan, batas-batas suatu blok harus ditentukan berdasarkan suatu karakteristik fisik yang tidak berubah dalam jangka waktu yang lama. Untuk itu, batas-batas blok harus memanfaatkan karakteristik batas geografis permanen yang ada, jalan bebas hambatan, jalan arteri, jalan lokal, jalan kampung/desa, jalan

setapak/lorong/gang rel kereta api, sungai, saluran irigasi, saluran buangan air hujan (drainage), kanal, dan lain-lain.

SISMOP, sebagai pedoman administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mulai diaplikasikan (diberlakukan) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1992, merupakan sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB. SISMOP diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem perpajakan di masa mendatang yang membutuhkan kecepatan, keakuratan, kemudahan dan tingkat efisiensi yang tinggi. Untuk menunjang kebutuhan akan sistem perpajakan diatas maka SISMOP memasukkan Program Komputer sebagai salah satu unsur pokoknya. Program komputer adalah aplikasi komputer yang dibangun untuk dapat mengolah dan menyajikan basis data SISMOP yang telah tersimpan dalam format digital.

Pada awalnya system komputerisasi dibangun dalam suatu *plat-form* sebagai berikut :

- a. Menggunakan perangkat keras berbasis Personal Computer (server);
- b. System operasi Unix;
- c. Perangkat lunak basis data Recital dan ;
- d. Program aplikasi SISMOP yang dibangun menggunakan perangkat lunak Recital.

Sejak tahun 1996, program computer ini dikembangkan pada aplikasi lainnya, antara lain aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) PBB dan aplikasi Pelayanan Informasi Telepon (PIT). Aplikasi SIG PBB dan PIT merupakan suatu system yang terintegrasi dengan SISMIOP sebagai sumber informasi data numeris.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan untuk lebih meningkatkan kinerja, kemampuan yang lebih baik dalam mengolah basis data yang tersimpan, maka aplikasi SISMIOP sejak tahun 1997 telah dikembangkan dalam perangkat lunak basis data Oracle. Perangkat lunak Oracle merupakan perangkat lunak basis data yang dipilih oleh Departemen Keuangan RI sebagai standar pengolahan basis data, sehingga seluruh instansi di bawah Departemen Keuangan diharapkan akan lebih mudah dalam tukar menukar informasi.

Dalam aplikasi SISMIOP, terdapat beberapa aplikasi pendukung yang merupakan system informasi terintegrasi dari semua aktivitas PBB. Hal ini dalam upaya mengoptimalkan fungsi-fungsi organisasi baik dalam bidang pengadministrasian, pelayanan, dan pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Direktorat PBB dan BPHTB telah mengembangkan system-sistem penunjang SISMIOP berupa

Sistem Informasi Geografis (SIG), *Payment On-line System* (POS) dan Pelayanan Informasi Telepon (PIT).

c) *Payment On-line System* (POS)

POS PBB merupakan suatu aplikasi jantung pendukung SISMIOP yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pembayaran PBB dan pemantaunnya. POS PBB mulai diimpleemntasikan pada bulan Agustus 1999 di DKI Jakarta. Dengan adanya aplikasi ini, wajib pajak di Jakarta dapat melakukan pembayaran PBB di setiap tempat di wilayah DKI Jakarta tanpa terikat dengan wilayah administrasi. Selain itu, adanya aplikasi ini akan menunjang monitoring arus penerimaan PBB ke kas Negara. Hal ini dimungkinkan dengan dibentuknya jaringan yang menghubungkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan setiap Bank Tempat Pembayaran dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penerimaan PBB seperti Dipenda dan Kanwil DJP.

Secara singkat tujuan yang ingin dicapai dari system ini adalah :

- Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan cara member kesempatan membayar PBB di Bank tempat Pembayaran (TP) manapun.
- Meningkatkan kineja Bank Tempat Pembayaran dalam memberikan

pelayanan kepada wajib pajak dan meminimalkan terjadinya manipulasi.

- Menyediakan data penerimaan secara akurat setiap waktu kepada pihak yang berkepentingan.
- Meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah pada khususnya dan Negara pada umumnya.

a. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) PBB adalah suatu system yang dirancang terintegrasi dengan SISMIOP dengan menekankan pada analisa secara parsial (keruangan) yang selama ini tidak dapat ditangani oleh aplikasi SISMIOP. Secara umum aplikasi ini diharapkan akan mendukung fungsi administrasi PB yang mencakup kegiatan pemantauan operasional, manajemen, pengambilan keputusan dan evaluasi kerja. Banyak sekali fungsi manajemen yang dapat didukung oleh SIG PBB. Dengan memvisualisasikannya dalam tampilan spasial, pengambilan keputusan di Direktorat PBB dapat lebih mudah untuk menentukan dan mengambil kebijakan yang diperlukan.

b. Pelayanan Informasi Telepon (PIT)

PIT PBB adalah salah satu system aplikasi pendukung SISMIOP yang berfungsi untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak terutama yang berkaitan dengan informasi atas objek pajak yang dimiliki wajib pajak yang bersangkutan melalui

telepon atau mesin faksimili. Informasi yang dapat disajikan melalui PIT antara lain informasi jumlah ketetapan PBB terutang, status pembayaran, informasi objek PBB seperti luas tanah, luas bangunan, kelas tanah dan bangunan dan informasi lainnya

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif atau deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan, penelitian pustaka berupa studi kepustakaan yang terdiri dari analisis dokumen media massa dan web Internet yang berkaitan dengan tema penelitian, sementara penelitian lapangan terdiri dari wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 tahap, diantaranya: Reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data dan kesimpulan atau verifikasi data. Sementara untuk informan penelitian ini adalah Informan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Kasubag Data dan Informasi
3. Staf dan Pegawai
4. Tim Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sehubungan dengan peralihan PBB-P2 dari pusat ke daerah, Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak melakukan kebijakan dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern PBB-P2 yaitu dengan menggunakan sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP). SISMIOP dapat diibaratkan sebagai jantungnya PBB-P2 karena telah mencakup seluruh aspek pengelolaan administrasi PBB-P2 yaitu proses pendataan, penilaian, penangihan, penerimaan dan pelayanan.

Adanya SISMIOP dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan *up to date* dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB-P2 kedalam suatu wadah, sehingga pelaksanaannya lebih seragam, sederhana, cepat dan efisien. Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), definisi SISMIOP adalah : "Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan Komputer sejak pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian )

pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan Satu Tempat". SISMIOP dibangun dengan tujuan mendukung penyediaan informasi yang berhubungan dengan seluruh fungsi di dalam administrasi pada semua tingkat organisasi pengelola PBB-P2. SISMIOP diperuntukkan bagi kegiatan operasional dan manajemen, pengambilan keputusan, evaluasi kerja, dan analisis kebijaksanaan melalui aplikasi komputer. SISMIOP dibangun dengan Vol. XVI, No.3. Desember 2017 2793 Jurnal Riset Daerah menggunakan pendekatan sistem, yaitu permasalahan yang dihadapi ditinjau secara komprehensif dan terpadu sehingga tujuan yang akan dicapai merupakan solusi yang memperhatikan interaksi antara komponen-komponen organisasi dan komponen eksternal.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan untuk lebih meningkatkan kinerja serta meningkatkan kemampuan yang lebih baik dalam mengolah basis data yang tersimpan, maka sejak tahun 1997 aplikasi SISMIOP telah dikembangkan dalam perangkat lunak basis *data Oracle*. SISMIOP terdiri atas 5 (lima) unsur dan

beberapa sub sistem. Di dalamnya terdapat unsur NOP, Blok, ZNT, DBKB, dan Program Komputer, serta sub sistem pendataan, sub sistem penilaian dan pengenaan, sub sistem penagihan, sub sistem penerimaan dan sub sistem Pelayanan Satu Tempat. Beberapa sub sistem tersebut melakukan fungsi yang berlainan, tetapi menggunakan basis data yang sama.

Untuk mengoperasikan sistem ini dengan bantuan komputer, setiap objek pajak diberi Nomor Objek Pajak (NOP) sebagai tanda pengenal yang unik, permanen dan standar. NOP adalah alat yang dapat mengintegrasikan fungsi-fungsi dari masing-masing sub sistem yang ada dalam SISMIOP untuk memenuhi fungsi dan tugas pokok BKAD. Dalam pengelolaan SISMIOP, user harus dibagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yaitu : 1. Operator yaitu seseorang atau beberapa orang yang mempunyai tugas untuk memasukan data/informasi ke dalam sistem. Operator dalam hal ini meliputi *Operator Data Entry* (ODE) dan petugas pelayanan. 2. Administrator yaitu seseorang atau beberapa orang yang mempunyai tugas untuk mengatur akses data oleh operator atau user SISMIOP. Administrator dalam hal ini adalah Operator Console (OC) yang merupakan tim SISMIOP di BKAD Kabupaten Bandung. 3. User adalah seseorang atau beberapa orang yang

mempunyai hak akses dalam SISMIOP tetapi hanya mempunyai hak untuk membaca isi dari SISMIOP.

User merupakan staf Bidang Pendaftaran dan Penetapan dan Bidang Penagihan BKAD Kabupaten Bandung yang meliputi petugas SIG dan analis PBB-P2. SISMIOP mempunyai sebelas menu utama yaitu File, Pendataan, Penetapan, Penilaian, Pengurangan, Keberatan, Pembayaran, Penerimaan, Penagihan, PST, Referensi dan Lihat. Setiap menu terdiri atas beberapa sub menu yang digunakan oleh user dalam mengolah data PBB P-2 dan memberikan pelayanan terhadap permohonan perubahan data dari wajib pajak. Antarmuka menu utama SISMIOP seperti pada Gambar Menu Utama Sismiop User SISMIOP di BKAD Kabupaten Bandung masing-masing mempunyai password untuk dapat login pada menu utama SISMIOP. Namun user memiliki hak akses yang berbeda dalam menggunakan sub-sub Vol. XVI, No.3. Desember 2017 2794 Jurnal Riset Daerah menu pada SISMIOP, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan analisis efektifitas organisasi, melalui pemanfaatan aplikasi SISMIOP di BPKAD Kabupaten Bandung, terdapat empat indikator, meliputi :

1. Kejelasan Tujuan

SISMIOP dirancang di dipergunakan secara umum adalah dengan bertujuan untuk

memudahkan sistem pengguna pajak khususnya Objek Pajak dalam melakukan pembayaran pajak yang sudah terintegrasi. Hal inipun menjadi suatu terobosan baru guna sebagai respon proses digitalisasi dalam pelayanan publik. Kemudahan kecepatan dan ketepatan menjadi tujuan pokok penerapan SISMIOP ini sehingga masyarakat selaku objek pajak tidak perlu ribet dan susah payah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai objek pajak tersebut.

## 2. Komposisi struktur

Struktur dari SISMIOP ini dilakukan di tingkat pemerintah daerah yang diluncurkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota melakukan sistem administrasi untuk objek pajak. Sehingga struktur komposisi ini adalah dipegang oleh pemerintah pusat secara langsung akan tetapi di desentralisasikan kepada pemerintah daerah untuk penggunaan aplikasi tersebut.

## 3. Teknologi Organisasi

Teknologi organisasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyedia layanan manajemen berbasis digital. SISMIOP yang dirancang sebagai teknologi organisasi yang diperuntukan pajak ini tentunya memiliki sistem teknologi tersendiri. Secara komprehensif teknologi SISMIOP ini di *launching*-kan oleh Direktorat Jendral

kementerian keuangan yang kemudian di desentralisasikan kepada daerah masing-masing, salah satunya pada pemda kabupaten Bandung.

Suksesnya pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di daerah, juga didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang lengkap. Kelengkapan sarana teknologi informasi di daerah dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu hardware dan software yang digunakan, ketersediaan data, dan dokumentasi. Daerah perlu mengetahui hardware dan software yang digunakan dalam melakukan pengelolaan PBB-P2. Adapun hardware dan software yang dapat digunakan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam pengelolaan PBB-P2 adalah: (1) hardware a. server; b. personal computer; c. network; d. high speed printer; e. printer; f. plotter; (2) software; a. Operating System (OS); b. database; c. runtime aplikasi; d. aplikasi pemetaan; e. aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pajak, misalnya SISMIOP; dan f. aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG). 2. Pengadaan software sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Apabila akan menggunakan software aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pajak berupa 18 Pedoman Umum Pengelolaan pbb-p2 SISMIOP Ditjen Pajak, perlu dilakukan kustomisasi source code SISMIOP sehubungan dengan:

a. struktur organisasi;

- b. perubahan proses bisnis; dan
- c. perubahan format dan nomenklatur keluaran produk hukum (surat-surat ketetapan). Pemda dapat melakukan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pajak baru dengan memperhatikan:

- impor basis data SISMIOP Ditjen Pajak, atau migrasi basis data Ditjen Pajak ke basis data pemda;
- pemutakhiran data, untuk data masa transisi antara waktu backup data SISMIOP Ditjen Pajak sampai dengan waktu sistem baru pemda dioperasikan perlu dilakukan kustomisasi atas koneksi data pada program Payment Online System (apabila ada) sehubungan dengan adanya perubahan struktur data. Disamping itu, perlu juga dilakukan pengembangan services data interoperability untuk integrasi data dengan data center PBB-P2 dan BPHTB. Pengadaan hardware dan software tersebut sebaiknya tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah masing-masing. Penyesuaian itu tetap diperlukan agar tidak membebani keuangan pemda, sehingga pelaksanaan tugas dapat tetap terlaksana dengan biaya yang tidak terlalu besar. Tingkat kelengkapan

hardware dan software tersebut sebaiknya disesuaikan dengan volume pekerjaan dan jumlah wajib pajak yang dilayani.

#### 4. Lingkungan Organisasi

Secara garis besar lingkungan organisasi berpengaruh penting terhadap jalannya pelaksanaan SISMIOP, dimana hal ini terdiri dari lingkungan internal yang terdiri dari budaya kerja pemerintah BKAD Kabupaten Bandung yang sudah secara optimal melaksanakan penyelenggaraan SISMIOP ini, dari lingkungan SDM pemerintah cukup menunjang, serta dari kepemimpinan yang sudah sangat concert dari penggunaan aplikasi ini. Namun untuk faktor eksternal memang selalu ada beberapa pembaharuan dan update yang senantiasa harus merubah pola tatanan pemerintah daerah dimana harus menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Sehingga berdasarkan beberapa aspek penilaian efektivitas dengan adanya SISMIOP di Kabupaten Bandung bisa disimpulkan sudah berjalan optimal, namun ada beberapa pembaharuan yang sifatnya perlu penyesuaian antara pemerintah daerah itu sendiri dengan pemerintah pusat.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis efektifitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung menggunakan teori efektivitas organisasi berdasarkan pada empat indikator, yang menyimpulkan bahwa indikator kejelasan Tujuan, SISMIOP dirancang di dipergunakan secara umum adalah dengan bertujuan untuk memudahkan sistem pengguna pajak khususnya Objek Pajak dalam melakukan pembayaran pajak yang sudah terintegrasi. Hal inipun menjadi suatu terobosan baru guna sebagai respon proses digitalisasi dalam pelayanan publik. kemudahan kecepatan dan ketepatan menjadi tujuan pokok penerapan SISMIOP ini sehingga masyarakat selaku objek pajak tidak perlu ribet dan susah payah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai objek pajak tersebut.

Indikator komposisi struktur Struktur dari SISMIOP ini dilakukan di tingkat pemerintah daerah yang diluncurkan pemerintah pusat melalui kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pemerintah daerah ditingkat kabupaten/kota melakukan sistem administrasi untuk objek pajak. Sehingga struktur komposisi ini adalah di pegang oleh pemerintah pusat secara langsung akan tetapi di desentralisasikan kepada pemerintah daerah untuk

penggunaan aplikasi tersebut. kemudian teknologi Organisasi, Teknologi organisasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyedia layanan manajemen berbasis digital. SISMIOP yang dirancang sebagai teknologi organisasi yang diperuntukan pajak ini tentunya memiliki sistem teknologi tersendiri. Secara komprehensif teknologi SISMIOP ini di *launching*-kan oleh direktorat jenderal kementerian keuangan yang kemudian di desentralisasikan kepada daerah masing-masing, salah satunya pada pemerintah kabupaten Bandung.

Lingkungan Organisasi. Secara garis besar lingkungan organisasi berpengaruh penting terhadap jalannya pelaksanaan SISMIOP, dimana hal ini terdiri dari lingkungan internal yang terdiri dari budaya kerja pemerintah BKAD Kabupaten Bandung yang sudah secara optimal melaksanakan penyelenggaraan SISMIOP ini, dari lingkungan SDM pemerintah cukup menunjang, serta dari kepemimpinan yang sudah sangat concert dari penggunaan aplikasi ini. namun untuk faktor eksternal memang selalu ada beberapa pembaharuan dan update yang senantiasa harus merubah pola tatanan pemerintah daerah dimana harus menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Sehingga berdasarkan beberapa aspek penilaian efektivitas dengan adanya SISMIOP di Kabupaten Bandung bisa di simpulkan sudah berjalan optimal, namun ada beberapa perbaharuan yang sifatnya perlu penyesuaian antara pemerintah daerah itu sendiri dengan pemerintah pusat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Offset, McLeod Jr, Raymond dan George P Schell. 2008. Sistem informasi management : Yogyakarta.
- Direktur Jenderal Pajak no : KEP-533/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran pendataan dan penilaian objek dan subjek Bumi dan bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
- Dwiyanto, Agus, 1995, Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Fisipol Universitas Gajahma. Garna, K. Judistira.
- Moleong Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Sulastrif*, Bandung: PT. Remaja Remaja Rosdakarya.
- Rawati, N. (2013). Hubungan Kualitas Pegawai dengan Efektivitas Organisasi
- Syafii, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, Rineka Cipta
- Usman, Husaini. (2013). Perilaku organisasi: Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M, Mitami Dian, 2013. Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah